

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Pos Kota

Kurangi Kemiskinan Ekstrem, Pemprov DKI Jakarta Menambah Jumlah Penerima Bansos

PRESIDEN Joko Widodo menargetkan penghapusan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2021, orang yang miskin ekstrem ditandai dengan pengeluaran di bawah Rp 10.739 per hari atau Rp 322.170 per bulan.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemkeno PMK) lalu merinci kemiskinan ekstrem adalah kondisi masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu makanan, air bersih, tempat tinggal, sanitasi, kesehatan, pendidikan, serta akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.

Sebagai salah satu cara mengatasi kemiskinan ekstrem, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sosial memberikan bantuan sosial (bansos) Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD). Bansos PKD tersebut disalurkan melalui

Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), serta Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta (KPARJ untuk anak dan remaja yatim/piatu/yatim piatu yang orang tuanya wafat akibat Covid-19 lewat.

Untuk mengejar target Pemerintah Pusat, Pemprov DKI bahkan menambah jumlah penerima manfaat Bansos PKD. Jumlah penerima bansos KLJ, misalnya, bertambah dari 102.644 orang pada 2022 menjadi 219.448 orang pada 2023. Begitu pula penerima bansos KAJ, dari 8.952 anak pada 2022 menjadi 15.917 anak pada 2023. Sedangkan penerima bansos KPDJ meningkat dari 14.060 orang pada 2022 menjadi 21.892 orang pada 2023. Sementara jumlah penerima bansos KPARJ tetap 2.527 orang pada 2022 maupun 2023.

Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Premi Lasari mengungkapkan, perluasan sasaran itu berdasarkan kajian besaran kebutuhan primer setiap penerima dan verifikasi data di lapangan. "Misalnya, untuk Kartu Lansia Jakarta (KLJ), jumlah lansia yang ada di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) telah mencapai lebih dari 400 ribu orang. Oleh karena itu, diperlukan perluasan penerima manfaat. Berdasarkan verifikasi dan validasi di lapangan, terdapat 110 ribu tambahan penerima bansos KLJ," ungkapnya.

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 281 Tahun 2023 tentang Penerima dan Besaran Bantuan Sosial dalam Rangka Pelindungan Sosial Tahun Anggaran 2023, setiap penerima bansos mendapat Rp 300.000 per bulan. Karena merupakan akumulasi sejak Januari hingga April 2023, dana yang dicairkan pada akhir bulan lalu itu ditransfer kepada rekening Bank DKI penerima mencapai Rp 1.200.000.

Agar tepat sasaran, Pemprov DKI Jakarta membenahi data warga penerima bansos PKD. Caranya dengan melakukan uji kelayakan terhadap DTKS, yang merupakan syarat utama penerima bansos.

"Terkait penerima baru bansos, saat ini Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan verifikasi lapangan, untuk melengkapi variabel pembuatan rekening secara kolektif bagi calon penerima bansos baru. Verifikasi lapangan pembuatan rekening kolektif (burekol) itu untuk melengkapi data dan mengecek apakah benar orang-orang ini ada di wilayah domisilinya," tutur Premi.

Premi Lasari menegaskan, Pemprov DKI Jakarta akan terus memberikan bantuan sosial dalam rangka menjamin pelindungan bagi warga miskin di Ibu Kota. Selain lewat KLJ, KPDJ, KAJ, serta KPARJ, pihaknya juga menyalurkan bansos melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), dan serangkaian subsidi lainnya yang diupayakan tepat sasaran.

Sukses Jakarta untuk Indonesia.